

MENCERMATI GERAKAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF POPULISME ISLAM

Alwi Dahlan Ritonga, Muradi dan Firman Manan

Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran,
Bandung, Indonesia
alwiedahlan@gmail.com

Abstract

The rising wave of the rise of populism is one of the political phenomena that is happening all over the world at the moment. This is indicated by the appearance of populist figures and narratives in each election contestation. Almost all countries experience this wave hit with a variety of its own style. In the Indonesian context, researchers say that the rise of populism in Indonesia is a right-wing populism that carries a religious narrative as the spirit of its struggle. More specifically, right-wing populism referred to in Indonesia is Islamic populism. Studies on Islamic populism in Indonesia are numerous, but there are almost no experts who make students the focus of their research. In fact, students are one of the entities whose role in social change in Indonesia cannot be denied. In this article, the researcher will include a study of the existence of an Islamic populism movement among Islamic students in Indonesia. The focus of this study discusses several Islamic student organizations driven by students in the campus / university environment. The method used is a qualitative method with data collection techniques in the form of interviews and literature studies and data analysis techniques are using descriptive analysis techniques.

Keywords: *Student Movement, Populism, Islamic Populism*

Abstrak

Naiknya gelombang kebangkitan populisme adalah salah satu fenomena politik yang sedang terjadi di seluruh dunia saat. Hal ini ditandai dengan kemunculan tokoh-tokoh dan narasi populistik dalam setiap kontestasi pemilu. Hampir seluruh negara mengalami hantaman gelombang ini dengan berbagai corak tersendiri. Dalam konteks Indonesia, para peneliti

mengatakan bahwa populisme yang bangkit di Indonesia adalah populisme sayap kanan yang membawa narasi agama sebagai semangat perjuangannya. Lebih spesifik, populisme sayap kanan yang dimaksud di Indonesia adalah populisme Islam. Kajian mengenai populisme Islam di Indonesia sangat banyak, akan tetapi hampir tidak ada ahli yang menjadikan mahasiswa sebagai fokus penelitiannya. Padahal, mahasiswa adalah salah satu entitas yang tidak bisa dinafikan perannya dalam melakukan perubahan sosial di Indonesia. Dalam artikel ini, peneliti akan memuat kajian tentang adanya gerakan populisme Islam pada kalangan mahasiswa Islam di Indonesia. Fokus penelitian ini membahas tentang beberapa organisasi kemahasiswaan Islam digerakkan oleh mahasiswa di lingkungan kampus/universitas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur serta teknik analisis data adalah menggunakan teknik analisis deskriptif.

Kata kunci: Gerakan Mahasiswa, Populisme, Populisme Islam

Article History: Received 26 February 2020, Revised: 05 March 2020, Accepted: 30 April 2020, Available online 01 June 2020

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade belakangan, muncul godaan bagi para peneliti yang berkompeten dalam bidang ilmu sosial untuk mengkaji tentang populisme. Dikatakan bidang ilmu sosial, karena berbagai disiplin ilmu sosial tertarik mengkaji topik tersebut, seperti ilmu komunikasi (De Vreese, Esser, Aalberg, Reinemann, & Stanyer, 2018; Ritonga & Adela, 2020), agama (DeHanas & Shterin, 2018), sosiologi (Hadiz, 2019), studi kemananan (Muradi, 2017) dan tentu saja dari bidang ilmu politik (Pirro & Taggart, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa populisme sangat menarik dikaji dan menjadi bukti bahwa kemunculannya bersinggungan dengan beberapa dimensi kehidupan manusia saat ini.

Adanya godaan bagi para peneliti karena didasarkan pada hadirnya fenomena kebangkitan populisme yang menjalar hampir di seluruh belahan dunia. Untuk menggambarkan fenomena tersebut, seorang ahli ternama dalam kajian

hubungan internasional, Michael Cox (Cox, 2017), dalam tulisannya pertama-tama ia mengutip apa yang tertuang dalam Manifesto Komunisnya Marx (1846) tentang adanya suatu “momok” yang akan menghantui Eropa. Cox bermaksud untuk menganalogikan kedua fenomena tersebut dengan mengatakan *“it would seem that there is another very different spectre haunting Europe today. But it is not communism—that has been consigned to that proverbial dustbin of history—but another dangerous ‘ism’.* And that ism (as I am sure you are all aware) is something that has come to be known as populism” (Cox, 2017, p. 9). Ilustrasi Cox ini tepat sekali karena secara historis komunisme pada masanya juga pernah menjalar ke seluruh penjuru dunia seperti yang dialami oleh populisme saat ini. Walaupun memang, di antara keduanya tidak bisa disamakan secara filosofis maupaun teoritis. Akan tetapi, fenomena kemunculannya tidak bisa dipungkiri memang memiliki kemiripan.

Untuk membuktikan kebangkitan populisme tersebut, para peneliti biasanya selalu merujuk kepada kasus terpilihnya Trump di Amerika Serikat dan keputusan untuk keluarnya Inggris dari Uni Eropa (BREXIT) pada tahun 2016. Dua kasus ini seolah menjadi halaman khusus dalam lembaran sejarah abad 21 karena sangat menggemparkan dunia. Sehingga tidak heran jika hampir setiap peneliti yang mengkaji tentang populisme akan selalu mengawali tulisannya dengan *me-review* dua momen sejarah tersebut. Selain kedua momen tersebut, menurut W. McCoy (2017), secara bersamaan, satu generasi populis demagog memperoleh popularitas atau kekuasaan di negara-negara yang terhitung sebagai negara demokratis di seluruh dunia – seperti Nobert Hofer (Austria), Marine Le Pen (Prancis), Milos Zeman (Republik Ceko), Viktor Orban (Hongaria), Greet Wilders (Belanda), Vladimir Putin (Rusia), Recep Erdogan (Turki), Narendra Modi (India) Prabowo Subianto (Indonesia), Thaksin Shinawarta (Thailand), dan Rodrigo Duterte (Philipina). Kemudian, ada juga Bolsonaro di Brazil, Mahathir Muhammad di Malaysia dan Nicolas Maduro

di Venezuela. Deretan kasus-kasus tersebut menjadi bukti bahwa kebangkitan populisme memang nyata dan pantas membuat para peneliti tergoda untuk mengkajinya.

Jika melihat daftar nama-nama yang ditulis oleh W. MCcoy (2017, p. 8) diatas, maka kita akan mendapati salah satu nama yang berasal dari Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Masuknya nama Prabowo Subianto dalam daftar tersebut membuktikan bahwa Indonesia sendiri tidak lepas dari hantaman gelombang populisme tersebut. Selain MCcoy, masih banyak lagi ilmuwan politik yang telah melakukan kajian terhadap populisme yang ada di Indonesia, salah satunya seperti Mietzner (2015) yang mengatakan bahwa pemilihan presiden yang berlangsung pada tahun 2014 di Indonesia adalah pertarungan antara dua sosok populis yaitu Prabowo dan Jokowi. Hanya saja keduanya memiliki ciri yang berbeda dimana Jokowi lebih kepada populis teknokratik sementara Prabowo sosok populis yang lebih klasik. Dimana pada saat itu terlihat bahwa ternyata masyarakat Indonesia lebih suka dengan karakter populis teknokratik yang dibuktikan dengan berhasilnya Jokowi memenangkan pemilu.

Dari penelitian tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena oleh hantaman gelombang kebangkitan populisme tersebut. Seiring dengan hal tersebut, para ahli juga kemudian banyak yang mengarahkan penelitiannya terhadap isu-isu yang berkaitan dengan populisme di Indonesia. Jika berbicara mengenai populisme dalam konteks Indonesia, maka akan ditemukan bahwa tema mengenai populisme Islam adalah tema yang paling banyak mewarnai penelitian para ahli. Hal ini bisa dipahami karena alasan sosiologis Indonesia yang secara kuantitatif masyarakatnya didominasi oleh umat Islam. Ditambah lagi karena alasan historis mengenai Islam politik dan Politik Islam yang ada sampai saat ini.

Persoalannya kemudian adalah bahwa dari sekian banyak penelitian yang membahas mengenai tema populisme Islam di

Indonesia, sangat jarang bahkan boleh dikatakan tidak ada yang menjadikan mahasiswa sebagai objek kajiannya. Sebagai contoh, Vedi R Hadiz yang merupakan salah satu ilmuwan paling serius dalam mengkaji populisme Islam di Indonesia melalui salah satu karyanya yang cukup fenomenal yaitu buku yang berjudul *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah* (Hadiz, 2019). Jika diperhatikan lebih dalam, terlihat bahwa riset yang dilakukan oleh Hadiz hanya tersentralisasi pada kajian partai politik Islam dan ormas-ormas Islam. Hadiz menelusuri sejarah masing-masing partai dan ormas-ormas yang ada di Indonesia lalu kemudian menemukan bahwa dua elemen tersebut gagal dalam menjalankan agenda populisme Islam di Indonesia.

Akan tetapi, Hadiz tidak menyentuh tentang elemen mahasiswa dalam melakukan kajiannya. Hadiz terkesan mengabaikan eksistensi mahasiswa Islam dalam membicarakan konstelasi populisme Islam di Indonesia. Padahal, mahasiswa merupakan elemen penting dalam proses politik di Indonesia. Mahasiswa memiliki kekuatan yang sangat menentukan dalam politik. Menurut Bulkin (1991), kekuatan-kekuatan politik kontemporer menampilkan diri sebagai partai politik, angkatan bersenjata, pemuda, mahasiswa, kaum intelektual dan golongan pengusaha serta kelompok-kelompok penekan lainnya. Dari beberapa elemen yang menjadi kekuatan politik, mahasiswa mendapatkan tempat diantara yang lainnya. Hal ini dibuktikan oleh Litbang Kompas pada 2 Maret 2020, melalui data yang menunjukkan bahwa publik menganggap gerakan mahasiswa merupakan gerakan sipil yang paling efektif saat ini dengan peringkat pertama teratas (41,5%) kemudian diikuti oleh LSM di posisi kedua (18,7%), organisasi adat/kekerabatan/suku di peringkat ketiga (12,9%), kemudian di peringkat ke empat ada organisasi kepemudaan (12,1%) (Afrianto, 2020).

Jika berbicara mengenai gerakan populisme, maka hal utama yang melekat padanya ialah adanya keinginan untuk

melakukan perubahan dan perlawanan terhadap sistem yang dianggap mapan (*anti-establishment*). Dalam konteks dunia kampus, isu mengenai gerakan yang berkeinginan untuk mengubah sistem haluan ideologi negara dalam hal ini yaitu ideologi Pancasila dengan ideologi alternatif sudah ada cukup lama dan telah menjadi kajian khusus bagi beberapa ahli (Ritonga & Kusmanto, 2018, p. 55). Salah satu yang diidentifikasi sebagai organisasi mahasiswa Islam yang terlibat dalam upaya tersebut ialah organisasi Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pembebasan (Tempo, 2018). Akan tetapi, masih terdapat beberapa organisasi kemahasiswaan yang juga menjadikan Islam sebagai basis perjuangan dan pergerakannya seperti HMI, PMII, IMM dan KAMMI. Oleh karena itu, dalam tulisan ini peneliti mencermati organisasi-organisasi tersebut dalam bingkai populisme Islam.

Pengertian Tentang Populisme

Sebelum melakukan pembahasan lebih jauh, pertama-tama peneliti mencoba untuk menguraikan seputar kerangka teori yang berkaitan dengan populisme. Untuk menguraikan arti dari populisme itu sendiri, peneliti akan memulai dengan menelusuri artinya secara etimologis. Oleh karena itu, peneliti akan merujuk pada beberapa kamus dengan mencari kata kunci “Populism”. Dalam Cambridge Dictionary, Populisme adalah *political ideas and activities that are intended to get the support of ordinary people by giving them what they want*.¹ Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka secara leksikon populisme adalah gagasan-gagasan atau aktivitas politik yang dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan para rakyat biasa dengan memberikan apa yang mereka inginkan. Kamus Oxford Learners Dictionaries menerjemahkan Populisme sebagai *a type of politics that claims to represent the*

¹ Lihat di <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/populism>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2019

*opinions and wishes of ordinary people.*² Jika diterjemahkan maka artinya ialah tipe politik yang mengklaim mewakili pendapat dan harapan-harapan rakyat biasa. Kemudian, kamus Merriam-Webster, seorang populis adalah *a member of a political party claiming to represent the common people.*³ Menurut kamus ini, seorang populis adalah seorang anggota partai politik yang mengklaim mewakili rakyat biasa (jelata). Sedangkan secara akar kata, populisme merupakan kata yang berasal bahasa Latin yaitu *pöpulus*.

Berdasarkan penelusuran di atas, terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar diantara ketiga kamus tersebut. Interpretasi yang bisa diambil dari penelusuran di atas adalah *pertama*, populisme merupakan istilah yang digunakan dalam dunia politik. *Kedua*, merupakan bentuk pengakuan sebagai “representasi/wakil”. *Ketiga*, berkaitan dengan rakyat banyak, rakyat awam atau rakyat kecil. Dengan demikian, secara etimologis, populisme dapat diartikan sebagai paham yang berorientasi kerakyatan dan memiliki kehendak untuk menjadi representasi rakyat dalam memperjuangkan pendapat-pendapat, harapan-harapan dan apa saja yang diinginkan oleh rakyat secara politik.

Kemudian untuk memahami arti sesuatu, tentu saja tidak bisa hanya sekedar mengandalkan pengertian yang bersifat etimologis. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah dengan menelusuri pengertian terminologis dari beberapa pakar dan peneliti. Hal ini harus dilakukan, sebab pengertian yang disampaikan oleh para pakar berbeda dengan pengertian umum karena pengertian yang dikemukakan oleh pakar merupakan hasil kajian dan analisis dari penelitian empiris.

² Lihat di

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/populism?q=populism>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2019

³ Lihat di <https://www.merriam-webster.com/dictionary/populism>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2019

Cas Mudde adalah pakar yang berusaha mendefenisikan populisme dan merupakan salah satu yang paling banyak dirujuk pendapatnya. Menurut Mudde (2004, p. 543), sebagai sebuah ideologi, populisme akan melakukan pembelahan atau pemisahan kelompok masyarakat dalam bentuk yang homogen dan hubungan relasional yang terbangun sangat antagonistik, “orang-orang suci” menentang “elit korup” dan berpendapat bahwa politik harus menjadi ekspresi kehendak umum dari rakyat.

Masih mengutip Mudde, dijelaskan dalam Inglehart & Norris (2016) bahwa menurut Mudde (2007), setidaknya terdapat tiga karakter inti yang dimiliki oleh populisme yaitu:

1. Anti – kemapanan (*anti-establishment*)

Anti – kemapanan dimaksudkan sebagai sebuah filsafat yang menekankan keyakinan bahwa masyarakat banyak (rakyat) merupakan kalangan yang penuh kebijaksanaan dan kebajikan, sementara para elit, rezim dan sistem dianggap koruptif. Populisme menciptakan polarisasi antara mereka yang menganggap dirinya rakyat (*silent majority*) melawan mereka yang dianggap *establishment* kemudian diantara keduanya mencerminkan sinisme dan kebencian yang mendalam. Masyarakat awam dianggap homogen dan secara inheren “baik” atau “terhormat” berbanding terbalik dengan elit-elit yang pendusta.

2. Otoritarianisme

Kalangan populis sangat mengidolakan adanya sosok pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan otoriter. Karakteristik pemimpin yang kuat dan kharismatik dianggap bisa menjadi cerminan kehendak rakyat. Hal ini berangkat dari adanya kekecewaan terhadap pengelolaan demokrasi yang

dianggap selalu lebih mengutamakan kepentingan kelompok minoritas daripada kalangan mayoritas.

3. Pribumisme (*nativism*)

Kalangan populis selalu melontarkan serangan-serangan verbal terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai orang lain (non-pribumi). Adanya perasaan terancam dari pihak asing sangat mendominasi alam pikiran kalangan populis. Mereka menganggap bahwa masyarakat harus monokultural dan merasa risih dengan ide-ide multikulturasisme/pluralisme. Bahkan mereka cenderung mengeksklusi kalangan yang mereka anggap berbeda *out-sider* dari mereka. Jika melihat kasus Indonesia, terdapat istilah seperti “asing dan aseng” yang diucapkan untuk mengungkapkan keberadaan masyarakat minoritas yang dominan dan ekstraktif di masyarakat. Selain itu, pernah juga bergulir isu akan adanya gelombang imigran yang disusupi melalui adanya kerja sama tenaga kerja dengan negara lain.

Pendekatan Dalam Kajian Populisme

Dengan banyaknya perspektif dalam melihat kajian populisme, maka muncul berbagai perspektif dalam melakukan kajian ini. Dengan demikian, untuk memahami lebih rinci, maka peneliti akan memakai konsepsi yang dibuat oleh Gidron & Bonikowski (2013) yang telah berhasil melakukan identifikasi terhadap populisme melalui kajian mendalam terhadap berbagai literatur yang ada. Mereka membuat varian terhadap populisme dengan mengkategorikannya terhadap tiga pendekatan konseptual utama. Ketiga pendekatan itu ialah:

Populisme sebagai Ideologi

Dalam bahasa lain, pendekatan ini juga bisa disebut sebagai pendekatan ideasional yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada ide-ide atau gagasan yang disampaikan oleh aktor maupun kelompok populis. Dengan demikian, jika ideologi dianggap sebagai hal yang paling utama dari populisme, maka studi empirisnya harus mengarahkan

perhatian peneliti terhadap “pernyataan programatik” yang dibuat oleh aktor politik dan memperlakukannya sebagai unit analisis utama.

Populisme sebagai Gaya Diskursif

Pendekataan kedua ini dikonsepsi oleh Gidron dan Bart dengan merujuk salah satu sarjana yaitu de la Torre yang menganalisis fenomena populis di Amerika Latin dan mendefinisikan populisme sebagai sebuah “retorika” yang membangun politik sebagai moral dan etika perjuangan antara rakyat dan oligarki. Masih dalam Gidron dan Bart, Kazin mengatakan bahwa retorika adalah bahasa yang digunakan untuk mengklaim bahwa ia mewakili suara mayoritas sehingga secara jelas dalam populisme selalau mendikotomikan antara “kita” dan “mereka”. Bagi Kazin, populisme tidak bisa disebut sebagai ideologi yang menunjukkan nilai yang dipegang oleh aktor politik melainkan hanya sekedar model ekspresi politik yang secara strategis dan selektif dengan pembedaan ideologi kiri atau kanan dan liberal atau konservatif. Rooduijn dkk dalam Rahmah (2019) mengatakan bahwa definisi *populism as a discursive style* ini menjadi penting untuk digunakan sebagai kacamata melihat fenomena aktor politik. Definisi ini membuat sudut pandang terhadap populisme bukan lagi identitas ideologi seorang aktor politik melainkan *political talk* atau model ekspresi atau retorika. Aktor populis biasanya menggunakan bahasa yang sederhana yang dapat dipahami oleh orang biasa.

Komunikasi aktor populis dengan rakyat selalu menggunakan komunikasi langsung. Aktor populis lebih memilih saluran komunikasi langsung seperti TV, Radio dan media sosial atau media-media lainnya. Bahkan mereka juga kerap menyerang media-media mainstream karena dianggap tidak netral sebab sudah terkontaminasi oleh intervensi penguasa. Hal itulah yang menyebabkan mereka lebih memaksimalkan media-media kanal alternatif untuk menyuarakan kampanye. Michels Hasting dalam Rahmah

(2019, hal. 15) mengatakan bahwa populisme adalah sebuah gaya politik, dimana sebagai sumber perubahan dengan menggunakan retorika untuk menarik rakyat. Bentuk diskursif tersebut memiliki karakteristik kebijakan programatik yang minimal tetapi memiliki simbol yang kuat, misalnya saja isu mengenai pajak, etnis, elit, dan lain-lain.

Populisme sebagai Strategi Politik

Berbeda dengan pendekatan ideasional dan diskursif, beberapa sarjana menganjurkan pemahaman populisme sebagai mode strategi politik. Pendekatan ini, yang sangat lazim di kalangan sosiolog dan ilmuwan politik yang bekerja di Amerika Latin, terdiri dari tiga varian itu fokus pada berbagai aspek strategi politik: pilihan kebijakan, organisasi politik, dan bentuk mobilisasi (Gidron & Bonikowski, 2013). Dalam pendekatan ini, populisme menjadi alat bagi aktor politik untuk mendapatkan, merebut, menjalankan atau mempertahankan kekuasaan.

Tabel 1. Karakteristik dari tiga pendekatan penelitian populisme

Varian	Definition of populism	Unit of analysis	Relevant methods
Political ideology	A set of interrelated ideas about the nature of politics and society	Parties and party leaders	Qualitative or automated texts analysis, mostly of partisan literature
Political Style	A way of making claims about politics; characteristics of discourse	Texts, speeches, public discourse about politics	Interpretive textual analysis
Political Strategy	A form of mobilization and organization	Parties (with a focus on structures), social movements,	Comparative historical analysis, case studies

		leaders	
--	--	---------	--

Sumber: Gidron & Bonikowski, 2013

Dari tiga varian yang dikonseptualisasikan oleh Gidron dan Bart diatas, kita dapat melihat bagaimana cara kerja masing-masing pendekatan dalam melihat fenomena populisme. Ketiganya memiliki kekuatan masing-masing dalam meninjau fenomena. Untuk itu, maka peneliti perlu meninjau beberapa pendekatan yang ada agar lebih memahami cara yang lebih efektif dalam melihat fenomena populisme.

Pendekatan yang paling relevan dalam penelitian ini menurut peneliti adalah pendekatan ideasional/ideologi (gagasan). Sebab, organisasi mahasiswa merupakan organisasi yang dikenal sebagai tempat para mahasiswa belajar berpikir secara ideal dalam mempertimbangkan segala persoalan. Karena mereka masih berpikir pada tatatran ideal, maka tidak cocok menggunakan pendekatan gaya diskursif yang hanya sebatas menekankan retorika semata dan juga tidak cocok jika dilihat dari pendekatan strategi politik karena mereka bukan unit politik praktis pragmatis. Oleh karena itu, penelitian dengan pendekatan ideologi ini akan lebih memperhatikan gagasan-gagasan populistik yang terkandung dalam ideologi masing-masing organisasi tersebut serta mengkaji aspek programatik mereka.

Populisme dalam Konteks Indonesia (Populisme Islam Baru)

Bagian ini memuat sekitar teori-teori yang berkaitan dengan spesifikasi populisme yang eksis di Indonesia. Teori populisme Islam ini sebagian akan menyajikan pandangan Vedi R. Hadiz melalui bukunya yang berjudul Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah (2019). Uraian yang disajikan di dalam bagian ini menyangkut semua tesis-tesis yang telah dikemukakan oleh Hadiz. Penulis memilih pandangan Hadiz karena beliau merupakan satu-satunya pakar yang sangat komprehensif membahas mengenai populisme yang ada di Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan sarjana yang

sangat produktif menghasilkan penelitian terkait populisme dan juga menjadi rujukan bagi para peneliti populisme lainnya di Indonesia.

Dalam beberapa tulisan, disebut bahwa populisme yang paling menonjol di Indonesia adalah populisme “sayap kanan” – sebagai lawan dari populisme “sayap kiri”. Dikatakan demikian, karena populisme tersebut lebih diwarnai oleh narasi dan aktor-aktor keagamaan. Melihat fenomena ini, maka Hadiz membangun teoritiasi tentang adanya fenomena tersebut dengan membuat suatu konsepsi yang ia sebut sebagai “populisme Islam baru”. Bisa dikatakan bahwa Hadiz merupakan orang pertama yang membuat istilah tersebut. Hadiz mengatakan bahwa populisme Islam baru adalah bentuk spesifik dari mobilisasi sosial berbasis pada koalisi multikelas yang asimetris (Hadiz, 2019, p. 40).

Menurut Hadiz, kemunculan populisme Islam terkait dengan perubahan sosial yang biasanya berhubungan dengan terjadinya kemajuan perekonomian kapitalis, yang sarat dengan ketidak-merataan yang kontradiktif, dan terkait dengan tekanan yang lebih kontemporer, transformasi itu terjadi karena adanya globalisasi neoliberal. Faktor kunci kedua yang juga memunculkan populisme Islam adalah akibat warisan dari konflik sosial dari era Perang Dingin yang mengorbankan gerakan politik dan sosial Islam, yang secara khas menyebabkan hilangnya atau terjadinya domestifikasi kekuatan politik kiri dan bahkan liberal (Hadiz, 2019, p. 7).

Apakah yang membedakan antara populisme Islam baru dengan yang lama ? populisme Islam baru menggabungkan aspek-aspek kepentingan aspirasi, dan keluhan kelas-kelas sosial secara lintas sektor, khususnya kaum miskin perkotaan, kelas menengah perkotaan baru, dan kelompok-kelompok borjuis yang mungkin terpinggirkan, dengan cara yang potensial lebih kuat. Sementara, populisme lama hanya berakar di kalangan borjuis kecil tradisional perkotaan dan perdesaaan yang secara signifikan membentuk politik Islam

masa kini. Perkembangan basis-basis sosial yang luas dan beragam tersebutlah yang membedakan diantara keduanya (Hadiz, 2019, p. 6). Namun, kata Hadiz (Hadiz, 2019, p. 7), baik dalam bentuk lama maupun yang baru, konsepsi utama populisme Islam adalah menggunakan *umat* sebagai proksi untuk “rakyat” (*populi*) dengan artian bahwa masyarakat yang *saleh* diperhadapkan dengan elit yang digambarkan sebagai tidak bermoral dan tamak.

Menurut Hadiz, pada tataran organisasional, kendaraan-kendaraan populisme Islam baru dapat mencakup partai politik, tetapi terdapat kemungkinan lain akan adanya kendaraan lain seperti organisasi massa, paramiliter, dan sel teroris. Dengan demikian, berdasarkan pandangan Hadiz tersebut dapat dipahami bahwa partai politik bukanlah satu-satunya medium populisme Islam baru (Hadiz, 2019, pp. 53–54). Akan tetapi bisa saja melalui organisasi-organisasi lainnya yang menjadikan Islam sebagai label dan sarana mobilisasi pergerakannya. Oleh karena itu, bisa saja organisasi kemahasiswaan yang berbasis pada kalangan Islam juga menjadi bagian daripada populisme Islam baru tersebut.

Mahasiswa dan Dunia Politik

Menurut Mohtar (2003), belajar berpolitik bagi mahasiswa merupakan hal yang penting. Sebab, menurut beliau hal tersebut merupakan tuntutan daripada peran yang cocok diemban oleh para lulusan kampus yaitu *pertama*, sebagai manager dan *kedua* sebagai pencetus gagasan. Peran pertama lebih berorientasi pada tindakan, yaitu lebih menekankan masalah “*how to get things done*”. Peran kedua lebih berorientasi pada kegiatan pemikiran, yaitu lebih menekankan pada kerja “asah otak” untuk melahirkan kemungkinan alternatif. Berfungsi sebagai manager maupun sebagai pencetus gagasan memerlukan satu syarat utama kata Mohtar yaitu belajar bermasyarakat, terutama belajar memimpin masyarakat. Nah dengan demikian, belajar menyelesaikan

masalah-masalah kemasyarakatan secara bersama pada dasarnya adalah belajar berpolitik.

Selain karena faktor *interest* dan tuntutan peran mahasiswa. Menurut Sanit (2011, pp. 78–82), terdapat lima faktor pendorong pula bagi meningkatnya peranan mereka dalam kehidupan politik yang dilatarbelakangi oleh karakteristiknya. *Pertama*, sebagai kelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan terbaik, secara keseluruhan mahasiswa memiliki horizon yang luas untuk mampu bergerak di lapisan masyarakat. *Kedua*, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku pendidikan, hingga sampai di perguruan tinggi maka mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang panjang baik yang didapatkan melalui kurikulum perkuliahan maupun diskusi-diskusi di lingkungan kampus. *Ketiga*, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Sebab, mereka telah terbiasa dengan proses akulturasi sosial dan budaya karena keberagaman daerah, suku, bahasa dan agama yang ada di lingkungan kampus. *Keempat*, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise di dalam masyarakat maka dengan sendirinya dia merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda. *Kelima*, meningkatnya kepemimpinan mahasiswa di kalangan angkatan muda tidak terlepas daripada perubahan kecenderungan orientasi universitas.

Jika berbicara tentang jejak langkah mahasiswa dalam lanskap politik Indonesia, dalam berbagai literatur disebutkan bahwa mahasiswa merupakan salah satu kekuatan politik yang ada dalam peta kekuatan politik nasional (Bulkin, 1991; Magenda, 1991; Murdian S. & Dkk, 1999; Sanit, 2011). Hal ini tidak bisa dipungkiri karena melihat sejarah politik Indonesia yang penuh dengan bekas tangan-tangan para mahasiswa. Mereka tidak hanya muncul sebagai gerakan responsif yang bisanya sekedar mendobrak sistem mapan rezim, tetapi mereka

juga turut dalam membentuk desain politik nasional. Desain lama yang bercorak otoriter dirubah menjadi sangat demokratis seperti yang terjadi pada gerakan 98.

Memahami Gerakan Mahasiswa Dalam Bingkai Populisme

Menurut Budiman, (1983) mahasiswa merupakan kelompok intelegensia. Lebih lanjut, Latief (2012) memberikan kesimpulan dalam bukunya yang berjudul *Intelegensia Muslim dan Kuasa Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, bahwa tanggung jawab utama intelegensia ialah mentransformasikan populisme yang mulanya hanya sebatas kesadaran diskursif menjadi kesadaran praktis (Latief, 2012, p. 757).

Kemudian, setelah memposisikan mahasiswa sebagai bagian daripada kalangan intelegensia dan intelektual, maka terdapat tulisan yang lebih instrumentatif untuk dipakai meneropong permasalahan ini selain konsepsi Hadiz yaitu konsep yang dibuat oleh Jati, (2017). Menurut Jati, populisme Islam dalam konteks kalangan kelas menengah muslim dapat dipahami dengan dua pengertian yaitu pertama sebagai upaya mempopulerkan Islam di ruang publik dan kedua upaya membangkitkan Islam sebagai kekuatan kepentingan dan kekuatan penekan (Jati, 2017, p. 27). Berikut merupakan kategorisasi populisme Islam yang berkembang menurut Jati:

Tabel 2. Ekspresi Populisme Islam

No	Ekspresi Populisme Islam	Aktor	Tujuan
1	Populisme Berbasis Identitas	Kelompok <i>Being Islam</i>	Afirmasi dan Afiliasi dalam Modernitas

2	Populisme Berbasis Material	Kelompok Islam Organik	Aksesibilitas terhadap sumber ekonomi – politik kekuasaan
3	Populisme Berbasis Simbolitas	Kelompok Pengajian	Representasi Islam dalam Ruang Publik
4	Populisme Berbasis Tarbiyah	Kelompok Intelektual	Diseminasi Nilai, Norma, dan Prinsip Islam dalam Kehidupan
5	Populisme Berbasis Syariah	Kelompok Islam Konservatif	Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Sumber: Wasisto Raharjo Jati (2017)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, bahwa mahasiswa merupakan kalangan intelegensia dan intelektual, maka dengan memakai konsepsi Jati, mahasiswa Islam yang terlibat dalam organisasi keislaman dapat dikategorikan ke dalam populisme berbasis tarbiyah (dunia pendidikan) karena eksistensi pergerakan organisasi ini adalah di dunia pendidikan atau perguruan tinggi. Menurut Jati, tujuan populisme yang tergolong pada kalangan intelektual (mahasiswa) ialah diseminasi nilai, norma dan prinsip Islam dalam kehidupan. Kata kunci yang dapat dilihat dari konsepsi Jati adalah diseminasi. Diseminasi dapat dipahami sebagai suatu upaya penyebaran informasi untuk menimbulkan kesadaran lalu menerima dan kemudian mengubah perilaku sasaran dan akhirnya sasaran mampu memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi berbeda dengan sosialisasi karena diseminasi tidak hanya sebatas penyampain informasi belaka, tetapi lebih daripada itu proses penyampaian dilakukan secara terencana, terarah dan terkelola. Dalam konteks ini, diseminasi nilai, norma dan prinsip Islam berguna untuk mempompulkerkan dan membangkitkan kekuatan Islam.

Dalam artikel ini, Mahasiswa Islam diartikan sebagai mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi atau sederajat dan memeluk Islam sebagai agamanya. Lebih spesifik lagi, mahasiswa Islam yang dimaksudkan adalah para mahasiswa yang terdaftar dan telah melalui proses kaderisasi di organisasi-organisasi mahasiswa Islam di lingkungan kampus. Mereka adalah golongan mahasiswa yang memakai identitas agama Islam sebagai simbol dan ruh gerakannya.

Menurut Muhammad (2015), gerakan-gerakan Islam di berbagai perguruan tinggi di Indonesia terbentuk dan berkembang dikarenakan beberapa faktor. *Pertama*, faktor ideologis. Ideologi merupakan faktor yang sangat signifikan dalam membentuk kepribadian dan menggerakkan massa. Hal ini dijadikan untuk menunjukkan identitas mahasiswa Muslim. Islam menjadi identitas yang harus dimunculkan seiring dengan tampilnya identitas ideologis yang lain. *Kedua*, munculnya gerakan mahasiswa juga didorong oleh faktor politik. Hal ini bisa dilihat dari kemunculan HMI dan PMII diawal kemerdekaan sebagai bentuk respon terhadap maraknya organisasi-organisasi nasionalis dan sekuler. *ketiga*, faktor globalisasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap kemunculan dan perkembangan gerakan Islam kampus. Dengan globalisasi, paham dan ideologi Wahabi berkembang dan berpengaruh di Indonesia dan pada gilirannya juga mempengaruhi gerakan mahasiswa LDK dan KAMMI. *Keempat*, faktor terakhir menurut Wildan munculnya gerakan Islam kampus adalah yang disebut sebagai *political opportunity structure* (POS) atau struktur kesempatan politik. Menurut saya ada satu faktor lagi yang menyebabkan munculnya gerakan Islam kampus yaitu faktor kepentingan ormas Islam. Kepentingan yang dimaksud disini adalah kepentingan terhadap distribusi nilai-nilai serta kepentingan untuk mempersiapkan regenerasi melalui proses kaderisasi di dunia kampus. Hal ini seperti yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah melalui PMII dan IMM.

Lahirnya organisasi-organisasi kemahasiswaan Islam di dunia kampus sangat erat kaitannya dengan semangat populistik. Lahirnya organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang di prakarsai oleh Lafran Pane (1922-1991) di era awal-awal kemerdekaan yaitu pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta dilatarbelakangi oleh adanya kecemasan terhadap situasi negara dan dunia kampus yang semakin jauh dari nilai-nilai keislaman. Identitas keislaman semakin redup seiring dengan bangkitnya gerakan-gerakan sekular pada saat itu. Untuk itulah organisasi ini dibentuk sebagai upaya perlawanan bagi tatanan lama yang sangat sekularistik dan jauh dari nilai-nilai keislaman. Dengan berdirinya HMI di awal-awal kemerdekaan, wacana seputar wawasan keislaman dan kebangsaan menjadi tumbuh kembang dengan sangat subur di dunia kampus (Wekke, Sitompul, & Afkari, 2016). Pada medio tahun 60-an, ketika terjadi pertarungan ideologis yang sangat sengit antara kalangan Islam dengan Komunisme di Indonesia, HMI hadir sebagai ujung tombak “Umat Islam” di dunia kampus dan turut serta di tengah masyarakat melawan Komunisme dengan cara beraliansi dengan organisasi-organisasi keislaman lainnya seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Masyumi dan lain sebagainya (Alfian, 2013).

Idealisme yang terbangun pada kader-kader HMI membuktikan betapa kentalnya sisi populistik organisasi ini. Sebagaimana yang telah dibahas diatas, keberpihakan terhadap rakyat dan pertentangan dengan elit merupakan ciri daripada populisme, hal ini juga tergambarkan dalam organisasi HMI sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) PB HMI bahwa jika memang ada perseteruan antara rakyat versus rezim, HMI pasti berpihak pada rakyat. HMI akan melawan elit dengan syarat ketika elit tidak berpihak kepada rakyat (Informan Akmal Fahmi, *wawancara*. 2020). Namun menariknya, HMI tidak sejalan dengan ciri populisme yang sarat dengan otoritarianisme sebagaimana yang disampaikan oleh Cas Mudde. HMI sangat antipati dengan ciri ini karena

dianggap sangat rentan terhadap pemberangusan kebebasan rakyat. Berbicara tentang pengarus-utamaan kalangan pribumi, HMI menyampaikan bahwa organisasi ini bersifat kosmopolistik, artinya tidak membedakan ras, suku, agama bahkan kewarganegaraan. Tetapi dalam beberapa konteks harus tegas menentukan sikap dukungannya kepada kalangan pribumi seperti ketika negara terlalu mengutamakan para tenaga kerja asing di Indonesia. HMI akan memperjuangkan kalangan yang dianggap lemah (*mustad'afin*) tanpa melihat apa latarbelakangnya.

Pada 17 April 1960, lahir lagi sebuah organisasi kemahasiswaan Islam yang diberi nama sebagai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sama halnya seperti HMI, organisasi ini juga muncul sebagai upaya untuk mempopulerkan keislaman di kalangan mahasiswa. Akan tetapi, keislaman yang ingin dipopulerkan oleh PMII berbeda dengan HMI. Jika HMI berbicara tentang keislaman yang modernis, maka PMII lahir karena merasa tidak puas dengan HMI karena tidak mampu menampung aspirasi mahasiswa yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iklim intelektualitas yang mendominasi internal HMI saat itu adalah Islam pembaharu dan modernis. Hal ini membuat para anggotanya yang menganut Islam tradisional atau berhaluan Nahdatul Ulama merasa tidak tersalurkan aspirasinya (Muhammad, 2015, pp. 438–439). Sama halnya dengan HMI, PMII juga terlibat dalam melakukan perlawanan terhadap elit rezim Orde Lama dengan saluran Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Organisasi ini melakukan aliansi gerakan dengan berbagai organisasi lainnya demi untuk menumbangkan tatanan (rezim) yang dianggap buruk pada saat itu.

Organisasi lain yang lahir pada masa rezim Orde Lama adalah Ikatan Mahasiswa Islam (IMM). Organisasi kemahasiswaan ini lahir di Yogyakarta pada 14 Maret 1964. Sama seperti PMII, terbentuknya organisasi ini juga

dilatarbelakangi oleh adanya kekecewaan terhadap HMI yang dianggap tidak konsisten menjalankan prinsip modernisme dalam gerakannya (Muhammad, 2015, p. 441). Dengan demikian, IMM hadir untuk menjadi representasi dakwah umat Muhammadiyah di dunia kampus. Hal ini juga tertuang dalam tujuan IMM yang berbunyi terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Bagi IMM sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan DPP IMM Ari Susanto bahwa segala bentuk penindasan harus dilawan karena itu merupakan prinsip utama gerakan. Jika berbicara tentang elit versus rakyat, menurut beliau tidak hanya dengan elit negara, dengan elit swastapun harus dilawan jika melenceng dari prinsip keadilan (Informan Ari Susanto, *Wawancara*. 2020).

Ketiga organisasi kemahasiswaan Islam yang telah disebutkan diatas sama-sama lahir pada era Orde Lama. Menurut peneliti, ada keterkaitan antara faktor waktu kelahiran organisasi dengan karakteristik dan ciri yang kemudian melekat padanya. Semakin tua organisasi tersebut, maka semangat keindonesiaannya juga semakin kuat. Organisasi yang lahir pada fase Orde Lama memiliki kecenderungan yang kuat dalam mempertahankan keislaman dan keindonesiaan bahkan keduanya saling menguatkan satu sama lainnya. Kemungkinan yang dapat diutarakan terkait fenomena tersebut ialah bahwa organisasi-organisasi tersebut memiliki *sense of belonging* terhadap keindonesiaan karena terlibat langsung dalam proses pertarungan ideologis di sepanjang era Orde Lama sehingga dengan demikian maka masing-masing merasa memiliki saham dalam proses mempertahankan negara. Oleh karena itu, jika dicermati lebih dalam maka akan terlihat bahwa ada perbedaan anatara organisasi-organisasi kemahasiswaan Islam yang lahir pada era Orde Lama dengan organisasi yang lahir sesudahnya atau bahkan dengan organisasi yang lahir setelah reformasi. Setidaknya terdapat dua organisasi kemahasiswaan Islam yang

lahir pada masa-masa Orde Baru berakhir dan memiliki perkembangan yang cukup pesat di Indonesia. Kedua organisasi tersebut ialah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan.

Organisasi KAMMI lahir pada era reformasi ketika rezim Orde Baru sudah mulai runtuh yaitu bertepatan pada tanggal 29 Maret 1998 di Kota Malang. Terbentuknya organisasi ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang paling menonjol ialah akibat adanya proses panjang dari upaya deislamisasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru di Indonesia. Dengan runtuhnya rezim Orde Baru, kalangan yang selama ini memiliki religiusitas yang tinggi mulai berani untuk menonjolkan identitasnya ke permukaan. Sehingga hadirnya organisasi ini sering disebut seakan-akan sebagai wakil daripada spirit “Islam Baru” yang mengupayakan totalitas keislaman dalam kehidupan sehari-hari. KAMMI terlihat sangat menginginkan munculnya generasi muda Islam yang ideal, dengan tingkat kesalehan yang tinggi, menjunjung tinggi moralitas Islam dengan bentuk Islam yang kaffah (total, sempurna) (Muhammad, 2015). Munculnya gerakan yang menjadikan keislaman sebagai arus utama identitas perjuangan pada paska runtuhnya Orde Baru memperlihatkan akan adanya kebangkitan populisme Islam di Indonesia. KAMMI sangat populer di kalangan mahasiswa muslim yang merasa bahwa identitas keislamannya perlu diakui di ruang publik. Jika berbicara tentang konteks Keislaman dan Keindonesiaan, maka akan terlihat bahwa organisasi ini lebih menonjolkan aspek Keislaman sebagai arus utama perjuangannya di ruang publik.

Setelah runtuhnya Orde Baru, muncul lagi satu organisasi yang memiliki ciri dan identitas Keislaman yang sangat kuat. Organisasi ini didirikan pada 28 Februari 2004 di Auditorium Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia dengan menamakan dirinya sebagai Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan.

Organisasi ini menganggap bahwa sistem yang sedang dijalankan oleh negara saat ini adalah sistem yang salah secara total dan sangat jauh dari nilai-nilai syariat Islam. Menurut organisasi ini, sistem atau tatanan yang sedang dijalankan oleh negara saat ini ialah sistem *thogut* dan *kafir* oleh karena itu harus segera ditinggalkan. Sistem yang benar hanyalah sistem yang telah diajarkan oleh Islam melalui Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, *Khilafah Islamiyah* merupakan satu-satunya solusi jika umat Islam ingin mencapai kesejahteraan sebab itulah satu-satunya jalan panduan yang telah diberikan oleh Tuhan. Sementara sistem yang lain adalah sistem yang berasal dari pemikiran manusia dan sangat sarat dengan kelemahan. Islam harus bangkit dengan kembali kepada aturan Allah SWT. Kejayaan Umat hanya bisa tegak ketika hukum Allah SWT ditegakkan di segala lini kehidupan (Informan Farid Syahbana. *Wawancara*. 2020).

Penutup

Munculnya organisasi-organisasi kemahasiswaan Islam diatas menunjukkan bahwa ada upaya untuk mempopulerkan nilai-nilai Islam ke permukaan atau ke ruang publik. Nilai-nilai Islam perlu diamalkan oleh kalangan mahasiswa atau minimalnya diakui di dunia kampus. Masing-masing organisasi memiliki ideologi dan idealisme yang berbeda-beda. Penekanan perjuangannya juga berbeda-beda, tergantung pada konteks sejarah terbentuknya dan juga pada nilai perjuangan yang mereka anut. Organisasi yang lahir pada masa-masa fase Orde Lama terlihat lebih berupaya untuk menyelaraskan antara semangat Keislaman dan Keindonesiaannya dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang lahir pada masa paska Orde Baru. Organisasi yang lahir paska Orde Baru lebih menonjolkan aspek Keislamannya daripada aspek Keindonesiaannya bahkan jika melihat organisasi Gema Pembebasan, mereka sama sekali hanya menonjolkan aspek Keislaman saja. Menariknya, ciri populisme Islam yang muncul pada organisasi-organisasi diatas cukup berbeda-beda. Akan

tetapi, mereka hanya bertemu pada satu titik yaitu adanya penolakan terhadap gaya kepemimpinan yang otoriter. Jika berbicara tentang pertentangan elit versus rakyat, *Nativisme* dan proksi umat, semua organisasi bisa dikatakan hampir sama pendapatnya. Terakhir, organisasi-organisasi ini masih terus melakukan gerakan dengan gaya atau metode masing-masing dan tentunya dengan berlandaskan pada semangat pembelaan terhadap rakyat (umat).

Daftar Rujukan

- Afrianto, D. (2020, March 2). Memperkuat Gerakan Masyarakat Sipil. *Kompas*, p. 4.
- Alfian, M. A. (2013). *HMI 1963-1966 - Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Budiman, A. (1983). Peran Mahasiswa Sebagai Intelegensia. In A. Mahasin & I. Natsir (Eds.), *Cendekiawan dan Politik* (Cetakan I, pp. 143–163). Jakarta: LP3ES.
- Bulkin, F. (1991). Kekuatan Politik : Perspektif dan Analisa. In F. Bulkin (Ed.), *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia Pilihan Artikel Prisma*. Jakarta.
- Cox, M. (2017). The rise of populism and the crisis of globalisation: Brexit, Trump and beyond. *Irish Studies in International Affairs*, 28, 9–17. <https://doi.org/10.3318/ISIA.2017.28.12>
- De Vreese, C. H., Esser, F., Aalberg, T., Reinemann, C., & Stanyer, J. (2018). Populism as an Expression of Political Communication Content and Style: A New Perspective. *The International Journal of Press/Politics* 1, 23(4), 423–438. <https://doi.org/10.1177/1940161218790035>
- DeHanas, D. N., & Shterin, M. (2018). Religion and the Rise of Populism. *Religion, State & Society*, 46, 177–185. <https://doi.org/10.1080/09637494.2018.1502911>
- Gidron, N., & Bonikowski, B. (2013). Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda. *Weatherhead Working Paper Series*, (No. 13-0004), 0–38. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2459387>
- Hadiz, V. R. (2019). *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah* (Edisi Pert; I. Ahmad, ed.). Jakarta: LP3ES.
- Inglehart, R., & Norris, P. (2016). *Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2818659>

- Jati, W. R. (2017). DARI UMAT MENUJU UMMAH?: MELACAK AKAR POPULISME KELAS MENENGAH MUSLIM INDONESIA. *MAARIF*, 12(1), 22–36. Retrieved from https://www.academia.edu/34739817/Dari_Umat_Menuju_Ummah_Melacak_Akar_Populisme_Kelas_Menengah_Muslim_Indonesia
- Latief, Y. (2012). *Inteligensia Muslim dan Kuasa Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20* (Edisi Digi). Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi.
- Magenda, B. D. (1991). Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Sistem Politik: Suatu Tinjauan. In F. Bulkin (Ed.), *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia Pilihan Artikel Prisma*. Jakarta: LP3ES.
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. Honolulu: East- -West Center.
- Mohtar, M. (2003). *Negara, Kapital dan Demokrasi* (II). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudde, C. (2004). The Populist Zeitgeist. *Government and Opposition*, 39(4), 541–563. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/44483088>
- Mudde, C. (2007). *Populist Radical Right Parties in Europe*. New York: Cambridge University Press.
- Muhammad, W. (2015). Gerakan Islam Kampus: Sejarah dan Dinamika Gerakan Mahasiswa Muslim Jilid 3. In A. Azyumardi, B. Jajat, & A. Taufik (Eds.), *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia* (pp. 425–461). Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muradi. (2017). THE MILITARY , POLITICS , AND POPULISM IN INDONESIA. *International Journal of Asian Social Science*, 7(10), 883–890. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2017.710.883.890>
- Murdian S., W., & Dkk. (1999). *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa '98*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pirro, A. L., & Taggart, P. (2018). The populist politics of Euroscepticism in times of crisis: A framework for analysis. *Political Studies Association*, 00(0), 1–10. <https://doi.org/10.1177/0263395718770579>
- Rahmah, A. N. N. (2019). *Pasang Surut Populisme: Satu Dekade Populisme Basyir Ahmad di Pekalongan*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.

- Ritonga, A. D., & Adela, F. P. (2020). Mencermati Populisme Prabowo Sebagai Bentuk Gaya Diskursif Saat Kampanye Politik Pada Pemilihan Presiden 2019. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/politeia.v12i1.3170>
- Ritonga, A. D., & Kusmanto, H. (2018). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 52–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/politeia.v10i2.627>
- Sanit, A. (2011). *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan* (15th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Tempo. (2018, May). Terengah Menangkal Yang Radikal. *Tempo*. Retrieved from <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/155550/terengah-menangkal-yang-radikal?hidden=login>
- W. MCcoy, A. (2017). Global Populism: A Lineage of Filipino Strongmen from Quezon to Marcos and Duterte ALFRED. *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, 32(1–2), 7–54.
- Wekke, I. S., Sitompul, A., & Afkari, R. (2016). Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam dalam Pemikiran dan Dakwah di Indonesia. *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, 1(2), 167–184. Retrieved from <http://journals.mindamas.com/index.php/insancita/article/view/759>